



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2022



**BPK RI
PERWAKILAN
PROVINSI
KALIMANTAN
UTARA**





LAPORAN KINERJA

*BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Auditorat Keuangan Negara VI*

Tahun 2022

INDEPENDENSI – INTEGRITAS – PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 secara tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara atas pelaksanaan kinerja pada Tahun Anggaran 2022, yang penyusunannya didasarkan pada Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 adalah laporan kegiatan tugas dan fungsi unit kerja tingkat Eselon II di BPK yang meliputi kegiatan teknis dan kesekretariatan. Kegiatan teknis dilaksanakan oleh Subauditorat dan kegiatan kesekretariatan dilaksanakan oleh Sekretariat Perwakilan. Laporan ini disusun berdasarkan program kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dan rencana aksi Tahun 2023.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022. Kami mengharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai salah satu alat ukur untuk mencapai hasil yang lebih baik pada tahun mendatang. Akhirnya segala masukan, kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dalam penyusunan LAK yang akan datang.

Tarakan, Januari 2023
Kepala Perwakilan

Ttd

Ruben Artia Lumbantoruan
NIP 198010202006041005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BRIN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.bpk.go.id>

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	2
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	4
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	6
E. Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	17
B. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	23
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23
2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Hasil Evaluasi AKIP	30
B. Capaian Kinerja	30
C. Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Skor Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	34
D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	64
E. Perubahan Budaya Kerja	66
F. Realisasi Anggaran	66
G. Inovasi	68
H. Penghargaan	69
BAB IV PENUTUP	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Persebaran Agama dan Jenis Kelamin.....	7
Tabel 2. SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Rentang Usia	8
Tabel 3. SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Jenjang Pendidikan...	8
Tabel 4 Rincian Anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP).....	9
Tabel 5. Rincian Anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP)	10
Tabel 6. Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022	30
Tabel 7. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	35
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 Terhadap Target Jangka Menengah	37
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	38
Tabel 10. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 Terhadap Target Jangka Menengah	38
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	40
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Terhadap Target Jangka Menengah	41
Tabel 13. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	42
Tabel 14. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 Terhadap Target Jangka Menengah	43
Tabel 15. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	44
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 Terhadap Target Jangka Menengah	44
Tabel 17. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	45
Tabel 18. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 Terhadap Target Jangka Menengah	46
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	47
Tabel 20. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 Terhadap Target Jangka Menengah dalam Renstra BPK 2020-2024.....	48
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	49
Tabel 22. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Terhadap Target Jangka Menengah	50
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	51
Tabel 24. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Terhadap Target Jangka Menengah dalam Renstra 2020-2024.....	53
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	54
Tabel 26. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Terhadap Target Jangka Menengah dalam Renstra 2020-2024.....	55
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	56
Tabel 28. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 Terhadap Target Jangka Menengah.....	57
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan Capaian Tiga Tahun	58
Tabel 30. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Terhadap Target Jangka Menengah.....	58
Tabel 31. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir	60
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Terhadap Target Jangka Menengah dalam Renstra 2020-2024.....	63
Tabel 33. Anggaran dan Realisasi RKP Tahun 2022.....	66
Tabel 34. Anggaran dan Realisasi RKSP Tahun 2022	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.....	4
Gambar 2. SDM Kelompok Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	7
Gambar 3. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	11
Gambar 4. Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	12
Gambar 5. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan	12
Gambar 6. Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.....	13
Gambar 7. Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4	14
Gambar 8. Lift dan Mesin Pompa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	15
Gambar 9. Genset dan Traffo BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	15
Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020–2024.....	21
Gambar 11. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024.....	22
Gambar 12. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir...48	
Gambar 13. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir...50	
Gambar 14. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir...52	
Gambar 15. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir .64	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, pemerintahan yang kapabel, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui Perpres tersebut, setiap instansi pemerintah, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diwajibkan untuk menyelenggarakan SAKIP yang meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Sebagai bagian dari SAKIP, setiap instansi pemerintah, termasuk BPK, wajib untuk menyusun Laporan Kinerja. Pelaporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja tidak hanya melekat pada BPK sebagai lembaga, tapi juga wajib disusun oleh kepala satuan kerja yang ada di BPK termasuk Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka diperlukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Pedoman evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021. Sementara itu, untuk penerapan di lingkungan internal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diatur dengan Keputusan Sekjen BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada unit-unit kerja Pelaksana BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu satuan kerja pada Auditorat Keuangan Negara VI yang mengelola anggaran. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Auditor Utama Keuangan Negara VI sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 merupakan cerminan dari prestasi kerja yang telah dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan pada Tahun 2022. Tujuan dari penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ini adalah:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan

- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Menginformasikan pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara periode Triwulan akhir Tahun 2022;
- d. Menginformasikan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara periode Triwulan IV Tahun 2022; dan
- e. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada masa mendatang.

B. Tugas Dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK pada Bagian Kesembilan Pasal 635 ayat (1) menyatakan "BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara merupakan satuan kerja yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI".

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan fungsi:

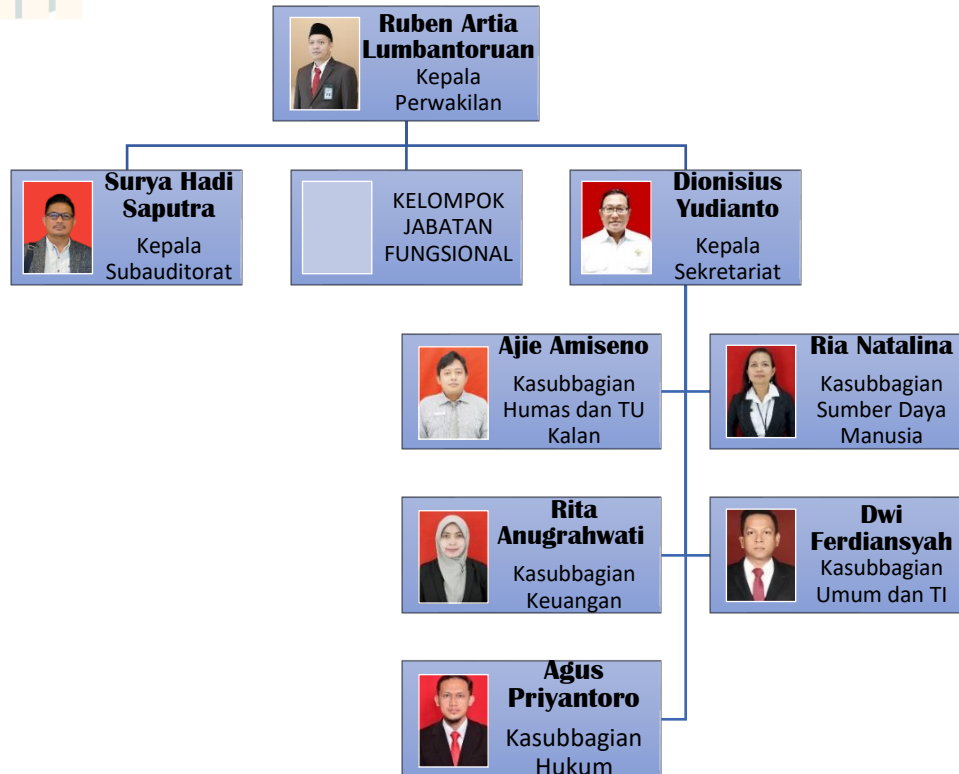
1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan,

pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;

5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;

18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 1. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, yang terakhir diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah unsur pelaksana, sebagian tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari:

1. Subauditorat Kalimantan Utara

Subauditorat Kalimantan Utara mempunyai tugas, yaitu:

- a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:
 - 1) Merumuskan rencana kegiatan;
 - 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
 - 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
 - 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;

- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
 - 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiiksa; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
 - 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

2. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;

- f. Penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

Sekretariat Perwakilan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas :

- a. **Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan**, yang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. **Subbagian Sumber Daya Manusia**, yang bertugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. **Subbagian Keuangan**, yang bertugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- d. **Subbagian Umum dan Teknologi Informasi**, yang bertugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- e. **Subbagian Hukum**, yang bertugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

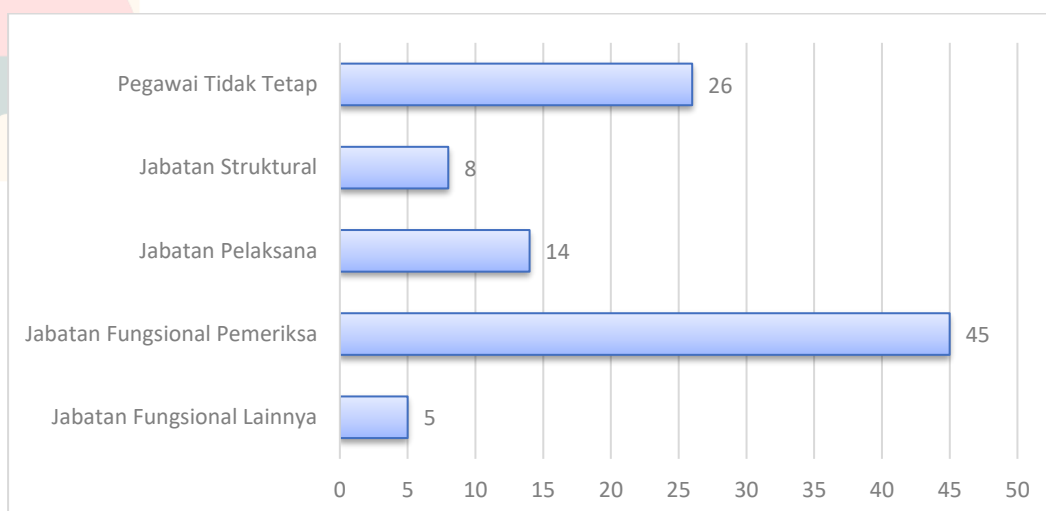
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia yang terdapat pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan bezzeting pegawai periode 31 Desember 2022 sebanyak 96 orang yang terdiri dari 47 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 24 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 25 Pegawai Tidak Tetap.

a. Berdasarkan Kelompok Jabatan



Gambar 2. SDM Kelompok Jabatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

b. Persebaran Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin

Tabel 1. SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Persebaran Agama dan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Agama			Jenis Kelamin	
	Islam	Katolik	Protestan	Laki-Laki	Perempuan
BPK Perwakilan Kaltara	5	1	2	6	2
Sekretariat Perwakilan	2			2	
Subauditorat Kaltara	16	2	6	9	15
Subbagian Humas dan TU Kalan	3		2	3	2
Subbagian Hukum	1			1	
Subbagian SDM	3				3
Subbagian Keuangan	3			2	1
Subbagian Umum dan TI	26			25	1
CPNS	19	0	5	13	11
SUB TOTAL	78	3	15	61	35
TOTAL	96			96	

c. Persebaran Berdasarkan Rentang Usia

Tabel 2. SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Rentang Usia

Unit Kerja	Rentang Usia							
	< 25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55
Sekretariat Perwakilan				1	2		1	
Subauditorat Kaltara		6	9	5	3	2		
Subbagian Humas dan TU Kalan		1	1	2	2			
Subbagian Hukum				1	1			
Subbagian SDM		1	2		1			
Subbagian Keuangan	1	2				1		
Subbagian Umum dan TI	4	6	7	4	2		2	2
CPNS	2	15	6	1				
SUB TOTAL	6	31	25	15	11	3	3	2
TOTAL	96							

d. Persebaran Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 3. SDM BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						
	SMK	D - 2	D - 3	D - IV	S - 1	S - 2	S - 3
Sekretariat Perwakilan					5	5	
Jabatan Fungsional Lainnya					3		
Subauditorat Kaltara					18	6	
Subbagian Humas dan TU Kalan			1		2	1	
Subbagian Hukum					2	1	
Subbagian SDM					2		
Subbagian Keuangan			1				
Subbagian Umum dan TI	20		2		3		
CPNS			1		23		
SUB TOTAL	20	0	5	0	58	13	0
TOTAL	96						

2. Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka untuk mewujudkan Target Kinerja Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada awalnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15.802.637.000,00. Alokasi anggaran tersebut kemudian direvisi menjadi Rp 16.026.553.000,00. Rincian anggaran untuk mewujudkan Target Kinerja Tahun 2021 disajikan di dalam **Lampiran 1.** yang terdiri dari anggaran untuk kegiatan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sejumlah Rp 5.397.063.000,00 dengan target 130 keluaran dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sejumlah Rp 10.629.490.000,00 dengan target 39 keluaran. adapun rincian anggaran RKP dan RKSP tersebut dijabarkan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 4 Rincian Anggaran Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP)

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
1	1043.FAF.U41	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	2,381,704,000	12 LHP
a.		<i>LHP Keuangan</i>	<i>763,120,850</i>	<i>5 LHP</i>
b.		<i>LHP Kinerja</i>	<i>1,130,630,150</i>	<i>5 LHP</i>
c.		<i>LHP DTT</i>	<i>487,953,000</i>	<i>2 LHP</i>
2	1043.FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	82,898,000	60 LHP
3	1043.FAF.U89	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1,638,386,000	13 LHP
a.		<i>LHP Keuangan</i>	<i>588,111,500</i>	<i>6 LHP</i>
b.		<i>LHP Kinerja</i>	<i>714,896,600</i>	<i>5 LHP</i>
c.		<i>LHP DTT</i>	<i>335,377,900</i>	<i>2 LHP</i>
4	1043.FAF.059	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	655,327,000	1 LHP
5	1043.FAF.116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	75,656,000	12 Laporan
6	1043.FAF.124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	76,233,000	12 Laporan
7	1043.FAF.083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1,960,000	1 Rumusan
8	1043.FAF.174	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	444,324,000	12 Laporan
a.		<i>Pelaksanaan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan</i>	<i>10,278,000</i>	
b.		<i>Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan</i>	<i>356,441,000</i>	
c.		<i>Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan</i>	<i>47,587,000</i>	
d.		<i>Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan</i>	<i>7,760,000</i>	
e.		<i>Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD</i>	<i>22,258,000</i>	
9	1043.FAF.091	Sumbangan IHPS Perwakilan	37,244,000	2 SIHPS

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
10	1043.FAF.099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3,331,000	6 Laporan
		Jumlah (1 s.d. 10)	5.397.063.000	130

Tabel 5. Rincian Anggaran Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP)

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO
1	1043.FAF.175	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1,641,263,000	20 Laporan
a		Melaksanakan Layanan Tata Usaha	39,390,000	
b		Melaksanakan Layanan Kehumasan	326,164,000	
c		Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia	252,132,000	
d		Melaksanakan Layanan Keuangan	264,840,000	
e		Melaksanakan Layanan Umum dan TI	457,211,000	
f		Melaksanakan Layanan Hukum	220,828,000	
g		Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK	24,150,000	
h		Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	56,548,000	
2	1043.CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	239,520,000.00	18 Layanan
a		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	239,520,000.00	
3	1043.EBA.994	Layanan Perkantoran	8,748,707,000	1 Layanan
a		Gaji dan Tunjangan	3,839,935,000	
b		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,908,772,000	
a)		Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan	971,584,000	
b)		Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	38,400,000	
c)		Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	327,626,000	
d)		Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	221,520,000	
e)		Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	3,217,229,000	
f)		Layanan Dukungan Kesekretariatan Perwakilan	132,413,000	
		Jumlah (1 s.d. 3)	10,629,490,000	39

1. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan penunjang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana berikut.

a. Tanah dan Bangunan pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

1) Tanah

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memiliki dua bidang tanah seluas 13.279 m² yang terletak pada dua lokasi yaitu:

- a) Seluas 6.000 m² di Jl. Mulawarman No.98, Karang Anyar, Kota Tarakan Kalimantan Utara diperoleh pada Tahun 2016 digunakan untuk Mess Pegawai BPK (Bangunan Gedung Kantor, Auditorium, Mushola, Gudang dan Kantin).

2) Bangunan

a) Gedung Kantor

Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terletak di Jl. Mulawarman No.98, Karang Anyar, Kota Tarakan Kalimantan Utara, mulai ditempati pada Tahun 2019, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memiliki empat lantai, dengan luas bangunan masing-masing lantai yaitu:

- 1) Lantai pertama seluas 917 m²;
- 2) Lantai kedua seluas 917 m²;
- 3) Lantai ketiga seluas 917 m².
- 4) Lantai keempat seluas 917 m².



Gambar 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

b) Mess Pegawai

Dalam memenuhi kebutuhan prasarana pegawai dan pejabat di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, pada Tahun 2020 dibangun Mess 3 lantai, dengan luas masing-masing lantai kurang lebih 876 m². Fasilitas Mess terdiri atas 42 kamar tidur yang dilengkapi dengan toilet pada masing-masing kamar, dapur, dan lobby, 3 aula, 1 mushola, dan 1 ruang pengelola.



Gambar 4. Mess Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

c) Rumah Jabatan Kepala Perwakilan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara, pada tahun 2017 dilakukan kontrak kerja sama dalam hal sewa Rumah Jabatan Kepala Perwakilan, rumah jabatan tersebut terdiri atas dua lantai dengan luas 388 m². Fasilitas Rumah Jabatan Kepala Perwakilan terdiri atas 2 kamar tidur utama, 2 kamar tidur tamu, 1 kamar tidur pembantu, dapur, ruang tamu, ruang makan keluarga, dan garasi.



Gambar 5. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan

d) Rumah Jabatan Eselon III dan IV

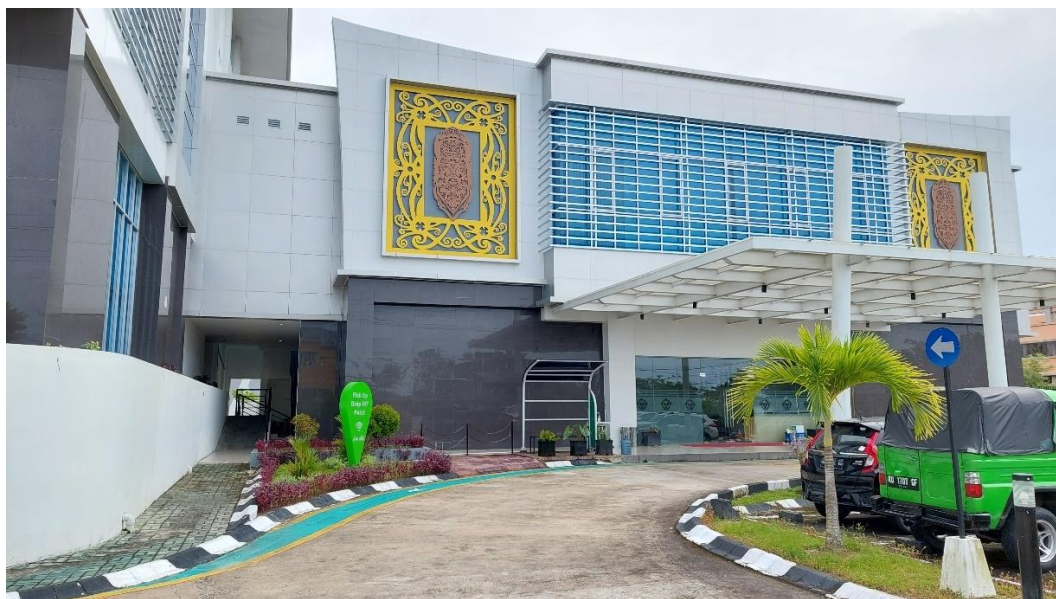
Rumah Jabatan Eselon III dan IV menjadi satu dengan bangunan mess pegawai BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, pada Tahun 2020 dibangun Mess 3 lantai, dengan luas masing-masing lantai kurang lebih 876 m². Fasilitas Mess terdiri atas 42 kamar tidur yang dilengkapi dengan toilet pada masing-masing kamar, dapur, dan lobby, 3 aula, 1 mushala, dan 1 ruang pengelola

e) Fasilitas Ibadah

Pada tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara membangun Ruang Musholla seluas 78 m² yang diberi nama Musholla Al-Baitul Hasib. Musholla tersebut terletak dibagian gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara di lantai 3 berada dekat dengan ruang studio.

f) Auditorium

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memiliki Bangunan Gedung Auditorium dengan dua lantai masing-masing seluas 904 m² dengan lantai satu diperuntukkan sebagai lobby yang dibangun pada Tahun 2019.



Gambar 6. Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

b. Peralatan dan Mesin pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Peralatan dan Mesin disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Pemeriksaan maupun pelaksanaan tugas penunjang, peralatan dan mesin berupa Alat Angkutan, Alat Besar, Alat Bengkel, Alat Ukur, Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Peralatan Komputer, Alat kedokteran dan Alat Komunikasi.



Gambar 7. Kendaraan Operasional Roda 2 dan 4



Gambar 8. Lift dan Mesin Pompa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 9. Genset dan Traffo BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

c. Aset Tetap Lainnya pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Aset tetap lainnya berada di Perpustakaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 1320 buku, 1 alat music set, dan 5 lukisan. Hingga tahun 2022, koleksi buku yang tersedia terdiri dari buku ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, kesehatan, kamus, dan beberapa jenis buku referensi lainnya. Koleksi buku ini dapat dipergunakan oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

E. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

1. Berdasarkan laporan *peer review* tahun 2021 dan 2022, pemeriksaan BPK masih berorientasi *output* dan *outcome* namun belum ke arah *impact*;
2. Pemeriksaan perlu lebih merespons isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
3. Pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi best practice dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
4. Perlu penyiapan sumber daya untuk mendukung implementasi dan pemanfaatan *Big Data Analytics* serta peningkatan tata kelola antara lain: penguatan pemeriksaan TI, menyebarkan pengetahuan, penerapan manajemen risiko, independensi anggaran, dan memperkuat *IT Driven* untuk mendukung proses bisnis sesuai hasil *peer review*
5. Optimalisasi kerja sama dan koordinasi dengan IPH dalam pemberantasan korupsi dan penanganan kasus penyelesaian ganti kerugian negara/daerah;
6. Optimalisasi capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan; dan
7. Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 disusun selaras dengan Renstra BPK 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkontribusi dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 menjabarkan rancangan rencana lima tahunan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Melalui visi ini BPK akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dengan demikian, BPK akan aktif menjalankan kegiatan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni:

- (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
- (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
- (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Selaras dengan tujuan BPK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tujuan “Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat.” Untuk

mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi".

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh organisasi BPK termasuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut, yaitu:

1. Independensi, yaitu BPK menjunjung tinggi independensi baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan. BPK bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi;
2. Integritas, yaitu BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan;
3. Profesionalisme, yaitu BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis
- 2) Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif
- 3) Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

- 4) Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
- 5) Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
- b. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi
Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Pada Tahun 2022, Renstra BPK telah disusun dan disahkan melalui Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024. Melalui Renstra 2021-2024, BPK telah menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK untuk lima tahun kedepan

Sesuai dengan Renstra 2020-2024, Visi BPK adalah:

"Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara"

Sedangkan Misi BPK 2020 - 2024 yaitu:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK telah menetapkan tujuan strategisnya untuk lima tahun kedepan yaitu:

"Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara Yang Berkualitas Dan Bermanfaat"

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan.

Selanjutnya, untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK telah menetapkan Sasaran Strategis periode 2021-2024 yaitu:

"Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi"

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020 – 2024 telah menetapkan dua arah kebijakan yaitu:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, yaitu:

- a. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis;
- b. Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif;
- c. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d. Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
- e. Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, yaitu:

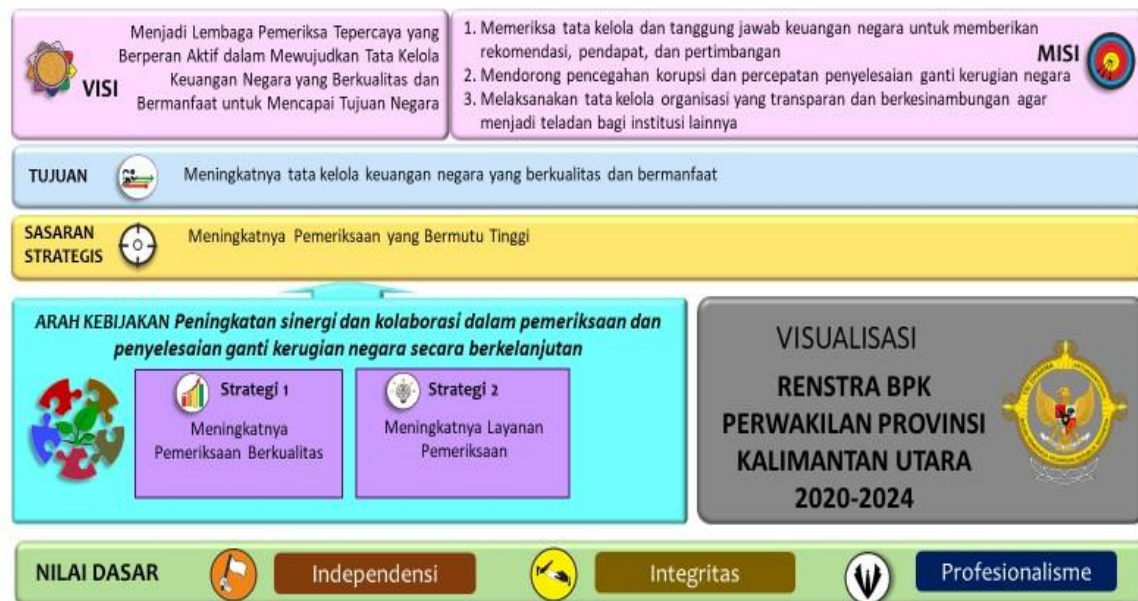
"Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan"

Berdasarkan Renstra BPK 2020 -2024, bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi BPK 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 10. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020–2024

Dalam mendukung pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun Renstra 2020-2024. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah disahkan di dalam Lampiran LXVII Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I Dan Eselon II Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024. Di dalam Renstra 2020-2024, Visi, Misi dan Tujuan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 juga sama dan sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Strategis BPK 2020-2024.



Gambar 11. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024

Berdasarkan Sasaran Strategis BPK 2020-2024, Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI) sebagai salah satu unit eselon I BPK, yang mempunyai tugas, antara lain memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, telah menetapkan Sasaran Strategis AKN VI BPK 2020-2024 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif". Untuk mendukung Sasaran Strategis BPK dan AKN VI BPK 2020-2024 tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan salah satu satuan kerja di AKN VI, telah merumuskan Sasaran Strategis pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024 yaitu:

"Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi".

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan dua sasaran yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas.

Sasaran 2 : Meningkatkan Layanan Pemeriksaan.

Untuk mencapai dua sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator kinerja yang harus dicapai. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2022. PK 2022 tersebut berisikan 13 indikator kinerja yang harus dicapai selama Tahun 2022. Rincian penjelasan dari 13 Indikator Kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

B. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun IKU beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dan Auditor Utama Keuangan Negara VI serta diketahui oleh Ketua BPK, Wakil Ketua BPK dan Anggota VI BPK. Sasaran, IK dan target pencapaian IK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja secara rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Untuk mencapai dua sasaran tersebut, terdapat indikator-indikator kinerja yang harus dicapai. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2022. PK 2022 tersebut berisikan 13 indikator kinerja yang harus dicapai selama Tahun 2022. Rincian penjelasan dari 13 Indikator Kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan difokuskan pada aspek yang terpenting yang berpengaruh pada kinerja tim pemeriksaan, meliputi proses pengawasan dan reviu di tingkat tim serta hasil evaluasi EPP atas LHP yang telah diterbitkan untuk memastikan hasil pemeriksaan yang baik.

Pelaksanaan kendali mutu dan penjaminan mutu dalam setiap penugasan pemeriksaan yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan hasil pemeriksaan sehingga terjadi perbaikan pada pemenuhan *quality control* dan *quality assurance*, ditindaklanjutinya seluruh hasil reviu dan rekomendasi Itama atas pelaksanaan pemeriksaan, dan berkurangnya kesalahan yang ditemukan di dalam laporan sebelum dituangkan ke dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHPS).

Pada Pemenuhan IKU 1 terkait Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan yang dicapai oleh BPK RI Kaltara pada

Keberhasilan pencapaian indikator ini dinilai melalui tiga IKU, sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan;
- 2) Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) Pemeriksaan; dan
- 3) Hasil Evaluasi EPP, meliputi Tingkat Konsistensi atas LHP dan Tingkat Akurasi atas LHP.

b. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan lima tahunan dan tahunan, yang memuat fokus pemeriksaan dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif atau TSAO (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pemeriksaan yang dilakukan harus pula disesuaikan atau memenuhi harapan penugasan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan. Keberhasilan pencapaian indikator ini dinilai dengan melihat kesesuaian antara simpulan dengan harapan penugasan dalam setiap pemeriksaan yang telah dilakukan dalam satu tahun anggaran.

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan dapat dilihat dari penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Semakin tinggi tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK juga akan menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penilaian indikator ini dengan melakukan perbandingan antara (a) Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (b) Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (c) Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (d) Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah (e) Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke *auditee*.

d. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG'

e. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK tidak akan bermanfaat jika tidak ada para pemangku kepentingan yang memanfaatkannya. Oleh karena itu, BPK akan memastikan bahwa seluruh produk yang dihasilkan relevan dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan karena keberadaan BPK dan kelancaran pelaksanaan mandat BPK sangat dipengaruhi oleh para pemangku kepentingan tersebut. BPK akan secara aktif merespon hal-hal yang relevan atau sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, harapan para pemangku kepentingan yang berbeda-beda, serta tanggap terhadap risiko yang muncul dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang diperiksa dengan tetap memelihara independensi BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara turut mendukung Arah Kebijakan BPK melalui Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Penghitungan indikator ini dengan melakukan perbandingan antara jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK terhadap seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa.

f. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Penghitungan indikator ini dengan melakukan perbandingan antara realisasi pemeriksaan tematik lokal terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal.

g. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK merupakan Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Indikator ini dihasilkan berdasarkan hasil survei dari pihak independen kepada seluruh pegawai di masing-masing satuan kerja dengan menggunakan skala tertentu.

Skala hasil survei tersebut yaitu:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

h. Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

i. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Anaystic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan.

Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pencapaian indikator ini dilakukan dengan melakukan penilaian atas layanan dasar, layanan aplikasi umum, serta layanan aplikasi pemeriksaan, dengan bobot sebagai berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan layanan dasar, terdiri dari: e-mail (15%); e-Drive (10%); Portal (5%);
- b. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: SISDM (25%);
- c. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan, terdiri dari: SMP (10%); SiAP (10%); SiPTL (10%);
- d. Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan (5%).

j. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*) Penerapan *best practice* dan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Best Practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan dan praktik terbaik setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP.

Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Formula untuk penghitungan indikator ini yaitu:

A. Tingkat penyusunan *Best Practice*, dengan formula:

$$A = (a/b) \times 100\%$$

dimana : a. Jumlah usulan Best Practice yang disusun

b. Jumlah usulan Best Practice yang direncanakan untuk disusun

B. Tingkat penerapan *Best Practice* , dengan formula:

$$B = (c/d) \times 100\%$$

dimana : c. Jumlah Best Practice yang diterapkan

d. Jumlah Best Practice yang direncanakan untuk diterapkan

C. Tingkat pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP), dengan formula:

$$C = (e/f) \times 100\%$$

dimana : e. Jumlah aktivitas MP yang dilaksanakan

f. Jumlah aktivitas MP yang direncanakan untuk dilaksanakan

k. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Skala hasil survei untuk penilaian dari indikator ini yaitu:

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

l. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Peningkatan kualitas organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara difokuskan pada pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan tugas. Kredibilitas organisasi akan sangat ditentukan oleh kecakapan dan keahlian dari para pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan setiap tahun.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tulus dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Penghitungan indikator ini yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat terhadap jumlah seluruh pegawai.

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014).

3. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

m. Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

- 1) Penyerapan anggaran;
- 2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
- 3) Pencapaian keluaran; dan
- 4) Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Sesuai dengan informasi dari Inspektorat Utama dan Direktorat PSMK, hasil evaluasi dari Itama atas AKIP atau Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Utara pada Tahun 2022 adalah sebesar 89,82. Sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan tersebut dikategorikan sebagai kategori A atau Memuaskan. Indikator ini menunjukkan pengukuran atau evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. Tujuan dari dilakukannya pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker.

B. Capaian Kinerja

Pengelolaan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Pengukuran atas capaian target yang telah ditetapkan tersebut dilakukan secara berkala melalui Aplikasi PRISMA meliputi proses penginputan, validasi, dan revidi data input. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara bersama Direktorat PSMK melakukan pengukuran secara bertahap dari mulai proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022:

Tabel 6. Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,68%	91,68
	1.1	Hasil QA dan QC Satker (Bobot 40%)		100%	
	1.2	Hasil Evaluasi EPP (Bobot 50%)		83,36%	
	1.3	Hasil Reviu Itama (Bobot 10%)		100	

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100
	2.1	Jumlah LHP yang Simpulannya sesuai dengan harapan penugasan		13	
	2.2	Jumlah LHP yang diterbitkan		13	
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,84%	105
	3.1	Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti		3.711	
	3.2	Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses		558	
	3.3	Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti		71	
	3.4	Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		41	
	3.5	Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee		4.441	
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	101,03
	4.1	Realisasi pemeriksaan tematik nasional		3	
	4.2	Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional		3	
	4.3	Alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan		1,03	
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	101

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
	5.1	Jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK		1	
	5.2	Seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa		1	
	5.3	Alokasi skor untuk pemeriksa yang terlibat		1	
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100,46
	6.1	Realisasi pemeriksaan tematik lokal		4,00	
	6.2	Rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal		4,00	
	6.3	Alokasi skor untuk pemeriksa yang terlibat		0,46	
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,63	92,60
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	A (89,82)	102,07
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	92,52%	95,38
	9.1	Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SISDM (Bobot 30%)		100%	
	9.2	Tingkat pemanfaatan Layanan Aplikasi JASMIN (Bobot 25%)		100%	
	9.3	Tingkat pemanfaatan Layanan Aplikasi Pemeriksaan Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP)		76,93%	
	9.4	Tingkat pemanfaatan layanan Aplikasi SiAP (*)		86,21%	

Sasaran Kegiatan dan Sasaran	Indikator Kinerja/Sub Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
	9.5	Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi Pemeriksaan (SiPTL)		99,58%	
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100
	10.1	Tingkat Penyusunan <i>Best Practice</i> (Bobot 50%)		100%	
	10.2	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i> (Bobot 25%)		100%	
	10.3	Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (Bobot 25%)		3,00	
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (4,10)	105
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
	12.1	Jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat		71,00	
	12.2	Jumlah seluruh pegawai		71,00	
	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%	90,20%	102,50
	13.1	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)		85,96%	
	13.2	Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)		96,57%	
SKOR KINERJA					100,29

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar **100,29**. Skor ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2021 yaitu **100,08**. Secara keseluruhan, pencapaian skor kinerja ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdapat tiga Indikator Kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
 - b. IKU 7 tentang Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
 - c. IKU 9 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

2. Terdapat tiga Indikator Kinerja mencapai target yang telah ditetapkan atau sama dengan target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 2 tentang Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
 - b. IKU 10 tentang Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
 - c. IKU 12 tentang Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.
3. Terdapat tujuh Indikator Kinerja melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. IKU 3 tentang Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
 - b. IKU 4 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
 - c. IKU 5 tentang Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan
 - d. IKU 6 tentang Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
 - e. IKU 8 tentang Hasil Evaluasi AKIP;
 - f. IKU 11 tentang Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
 - g. IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran.

C. Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Skor Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 sebagai berikut:

"Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi"

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI merupakan satuan kerja eselon I yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran strategis sesuai sasaran program dalam Perjanjian Kinerja AKN VI sebagai berikut:

"Meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif"

Dalam mendukung sasaran strategis AKN VI tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

"Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi"

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK yang tercermin dari keberhasilan program kegiatan organisasi. Hasil pemeriksaan mencakup rekomendasi, pendapat, pertimbangan dan penyelesaian ganti rugi merupakan hasil dari program teknis yang menjadi produk utama BPK. Selain itu, BPK juga berkomitmen untuk menjaga tata kelola organisasi agar berkinerja tinggi sebagai hasil dari program generik yang mendukung pelaksanaan pemeriksaan.

Sasaran Strategis
"Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi"
pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022
Telah Memenuhi Target yang Telah Ditetapkan

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022. Adapun penjelasan capaian Indikator Kinerja selama Tahun 2022 secara keseluruhan sebagai berikut.

IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan.

Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling.

Realisasi capaian IKU 1 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun		
	2020	2021	2022
Target	100%	100%	100%
Realisasi	83,33%	88,57%	91,68%
Capaian Realisasi	83,33%	88,57%	91,68%
Perubahan Realisasi	-	-	+3,11%

Pada Tahun 2022, Realisasi IKU ini sebesar 91,68% dari target 100%. IKU ini diukur melalui tiga sub IKU yaitu Sub IKU 1.1 tentang Hasil QA dan QC Satker (bobot 40%) dengan realisasi sebesar 100%, Sub IKU 1.2 tentang Hasil Evaluasi LHP (bobot 50%) dengan realisasi sebesar 83,36% dan Sub IKU 1.3 tentang Hasil Reviu Itama (bobot 10%) sebesar 100%.

Pada Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan Pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) atas 13 Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan. Pengendalian mutu (*Quality Control*) dilakukan dengan tujuan memastikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan sesuai dengan kondisinya. Pemerolehan keyakinan mutu (*Quality Assurance*) dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sesuai dengan standar dan praktik terbaik internasional dalam pemeriksaan, serta menjadi dasar penilaian atau kriteria atas mutu pemeriksaan untuk kegiatan sebelum sampai dengan setelah pemeriksaan dilakukan.

Adapun capaian hasil reviu Itama yaitu sebesar 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan telah sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2021, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 3,11%. Namun, capaian ini masih dibawah target yang diharapkan yaitu 100%. Untuk pencapaian tahun selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk meningkatkan pengendalian mutu (*Quality Control*) dan pemerolehan keyakinan mutu (*Quality Assurance*) atas setiap Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan.

Dengan demikian IKU 1 tentang Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan 2022.

Berikut akan disajikan perbandingan capaian IKU 1 terhadap target jangka menengah sebagai berikut.

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	91,68%	91,68%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 1 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 belum memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya berusaha meningkatkan kualitas reviu hasil pemeriksaan agar diperoleh kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

IKU 2 – Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

IKU 2 merupakan tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan. Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP.

IK 2 yaitu Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan 13 Pemeriksaan di luar pemeriksaan Bantuan Partai Politik. Pemeriksaan tersebut terdiri dari enam Pemeriksaan atas LKPD, lima Pemeriksaan Kinerja dan dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Berdasarkan hasil penilaian, seluruh pemeriksaan tersebut telah sesuai antara simpulan dengan harapan penugasan atau dengan realisasi sebesar 100%. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target di Tahun 2022. Selain itu, pencapaian pada Tahun 2022 tersebut sama dengan pencapaian pada Tahun 2021. Atas Pencapaian tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor IK sebesar 100.

Realisasi capaian IKU 2 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 2		Tahun		
Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan		2020	2021	2022
Target		100%	100%	100%
Realisasi		100%	100%	100%
Capaian Realisasi		100%	100%	100%
Perubahan Realisasi		-	-	-

Pencapaian IKU ini pada tahun 2022 sebesar 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan laporan evaluasi Direktorat EPP bahwa simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menerbitkan enam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan, lima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Berikut akan disajikan perbandingan capaian IKU 2 terhadap target jangka menengah sebagai berikut.

Tabel 10. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 2 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja				Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
				2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 2 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya berusaha untuk meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.

IKU 3 – Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan merupakan indikator kinerja satker yang menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Penilaian atas IK ini menggunakan hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dalam kurun waktu 2005 s.d. 2022. Proses Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan juga telah menggunakan Aplikasi SMP dan SiPTL.

Berdasarkan hasil pantauan, dari total 4.441 Rekomendasi yang diberikan selama Tahun 2005 s.d. 2022, seluruh pemda di wilayah Kalimantan Utara telah menyelesaikan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sebanyak 3.771 Rekomendasi dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 41 Rekomendasi. Masih terdapat 558 Rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti dan 71 Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan pencapaian tersebut, maka Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan selama Tahun 2005 s.d. 2022 adalah sebesar 85,84%. Pencapaian tersebut telah melebihi target sebesar 75%. Atas pencapaian tersebut, skor kinerja atas IK 3 adalah 105. Pada Tahun 2021, pencapaian atas IK 3 sebesar 86,08%. Sehingga terdapat penurunan sebesar 0,32%.

Tercapainya target IK 3 tidak terlepas dari peran aktif BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong *auditee* untuk melakukan percepatan tindak lanjut agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi. Secara rutin, setiap semester menyelenggarakan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dengan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Utara.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Realisasi capaian IKU 3 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun		
	2020	2021	2022
Target	75%	75%	75%
Realisasi	86,50%	86,08%	85,84%
Capaian Realisasi	115,33%	114,77%	114,45%
Perubahan Realisasi	-	-0,56%	-0,32%

Realisasi IKU 3 pada Tahun 2022 menggunakan data per 31 Desember 2022 dimana data realisasi tersebut belum termasuk penambahan tindak lanjut yang telah dibahas dalam pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2022. Sehingga realisasi tersebut bersifat sementara. Pada Semester II Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan percepatan penyelesaian TLRHP secara berkala. Hal ini dilaksanakan karena terdapat kecenderungan penurunan persentase penyelesaian TLRHP setiap periodenya.

Beberapa permasalahan dalam penyelesaian TLRHP diantaranya yaitu.

- 1) Belum tersedianya pengaturan lebih lanjut atas pemberian sanksi pada pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi sehingga menyebabkan penyelesaian TLRHP berlarut-larut;
- 2) Pemerintah Daerah tidak segera menindaklanjuti sehingga rekomendasi tersebut tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini seperti perubahan struktur organisasi dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Mekanisme penyelesaian TP/TGR di Pemerintah Daerah belum sepenuhnya optimal;
- 4) Pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian TLRHP tersebut tidak dapat ditelusuri keberadaannya khususnya untuk rekomendasi-rekomendasi yang sudah lama.

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat meningkatkan pencapaian IKU 3 ditahun selanjutnya diantaranya yaitu:

1. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berperan aktif dalam mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan mengevaluasi permasalahan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan atau yang berlarut-larut melalui program percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. Mendorong Pemerintah Daerah dengan membuat komitmen pencapaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada setiap periode.

Perbandingan realisasi IKU 3 Tahun 2022 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 3 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja				Target					Realisasi 2021	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
				2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan			75%	75%	75%	75%	75%	85,84%	114,45%

Berdasarkan tabel tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara optimis dapat memenuhi target sampai tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk melakukan evaluasi atas pencapaian dari tahun ke tahun agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Upaya perbaikan akan terus dilakukan melalui pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara lebih efektif dan efisien

IKU 4 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator kinerja ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang dan tugas fungsi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator.

Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/mandatory, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Pada Tahun 2022, realisasi IKU ini sebesar 100,38 dari target 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan capaian IKU 4 Tahun 2022 terhadap capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun		
	2020	2021	2022
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100,70%	100,28%	101,03%
Capaian Realisasi	100,70%	100,28%	101,03%
Perubahan Realisasi	+0,70	-0,42	+0,75

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU ini mengalami peningkatan sebesar 0,75. Namun demikian, realisasi ini masih diatas target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan tiga pemeriksaan tematik nasional yaitu Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2022 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Terkait Lainnya dengan output 1 LHP, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Instansi Terkait Lainnya di Nunukan dengan output 1 LHP, dan Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Yang Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Instansi Terkait Lainnya dengan output 1 LHP.

Berikut perbandingan realisasi IKU 4 Tahun 2022 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 4 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja			Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
			2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional		100%	100%	100%	100%	100%	101,03%	101,03%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 4 jika dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. Setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan. Tema pemeriksaan tematik nasional yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan ditetapkan pimpinan BPK. Dari tema tersebut, dilakukan analisis berdasarkan perkembangan kondisi terkini untuk mendapatkan fokus pemeriksaan yang lebih rinci dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

IK 5 yaitu Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan merupakan indikator kinerja yang baru dinilai pada Tahun 2022. Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara tidak melakukan Pemeriksaan berdasarkan permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan baik dari Lembaga Perwakilan maupun dari IPH.

Atas IK ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 101. Pencapaian tersebut telah melebihi dengan target di Tahun 2022 dan pencapaian pada Tahun 2021.

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur

jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Pada tahun 2022, realisasi IKU ini sebesar 100% dari target 100%. Pada tahun 2022, tidak ada permintaan pemeriksaan dari pihak pemangku kepentingan sehingga IKU ini tetap merealisasikan 100% sehingga memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 5 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan	Tahun		
	2020	2021	2022
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	101%
Capaian Realisasi	100%	100%	101%
Perubahan Realisasi	-	-	+1,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Hal dikarenakan tidak ada permintaan dari pemangku kepentingan pada tahun tersebut.

Berikut perbandingan realisasi IKU 5 pada tahun 2022 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 5 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja			Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
			2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 5	Tingkat Pemeriksaan Kepentingan	Pemenuhan dari Pemangku	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 5 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk dapat responsif dalam memenuhi pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Realisasi IKU ini sebesar 100% dari target 100% atau telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 6 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun		
	2020	2021	2022
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100,18%	100,46%
Capaian Realisasi	100	100,18	100,46
Perubahan Realisasi	-	-	+0,46%

Berdasarkan pencapaian atas IK ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 100,46. Pencapaian tersebut telah melebihi target di Tahun 2021 sebesar 100,18. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 yang pencapaiannya sebesar 100,18, maka terdapat peningkatan nilai kinerja pada tahun 2022 sebesar 0,46.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terlibat dalam empat pemeriksaan tematik lokal yaitu.

1. Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Pembinaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021 s.d. Semester I 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor;

2. Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Pembinaan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2021 s.d Semester I 2022 Pada Pemerintah Kota Tarakan dan Instansi Terkait Lainnya di Tarakan;
3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun 2021 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Tanjung Selor dan Tarakan, dan
4. Pemeriksaan Atas Efektivitas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

Berikut perbandingan realisasi IKU 6 Tahun 2022 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 6 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja			Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
			2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal		100%	100%	100%	100%	100%	100,46%	100,46%

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 6 jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2024 telah memenuhi target yang diharapkan. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara setiap tahunnya berupaya menyusun rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG'S.

IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Terkait pencapaian Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, realisasi yang dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,63. Nilai ini lebih kecil dibandingkan target nya yang sebesar 5,0. Atas pencapaian tersebut, skor kinerja yang diberikan adalah 92,60. Walaupun tidak mencapai target, realisasi Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada Tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan nilai skor jika dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 4,39. Hal tersebut menunjukkan bahwa tetap perlu ada perbaikan yang dilakukan guna meningkatkan IK tersebut.

Terdapat beberapa indikasi penyebab terjadinya penurunan tersebut diantaranya para pegawai pada BPK Perwakilan Kalimantan Utara masih belum sepenuhnya memahami

mengenai Nilai-Nilai Dasar BPK atau terdapat pegawai yang tidak serius dalam mengisi survei tentang Implementasi Nilai Dasar BPK. Penurunan ini tentunya perlu mendapat perhatian bagi BPK Perwakilan Kalimantan Utara sehingga pencapaian pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat dan memenuhi targetnya.

Direktorat PSMK telah meminta saran dan masukan terkait upaya untuk meningkatkan Implementasi Nilai Dasar BPK kepada para pegawai BPK. Berdasarkan masukan dari para responden, hal yang perlu ditingkatkan adalah melakukan sosialisasi dalam bentuk konkrit dan menarik serta meningkatkan pengawasan Implementasi Nilai Dasar kepada seluruh pegawai dan pimpinan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK. Untuk menjaga integritas dan kredibilitas kelembagaan BPK RI, perlu dukungan dari seluruh unsur pegawai yang ada di dalam organisasi. Setiap pegawai bertanggung jawab untuk memahami visi, misi dan nilai dasar BPK sebagai bahan yang melekat pada dirinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei oleh pihak independent dengan skala sebagai berikut.

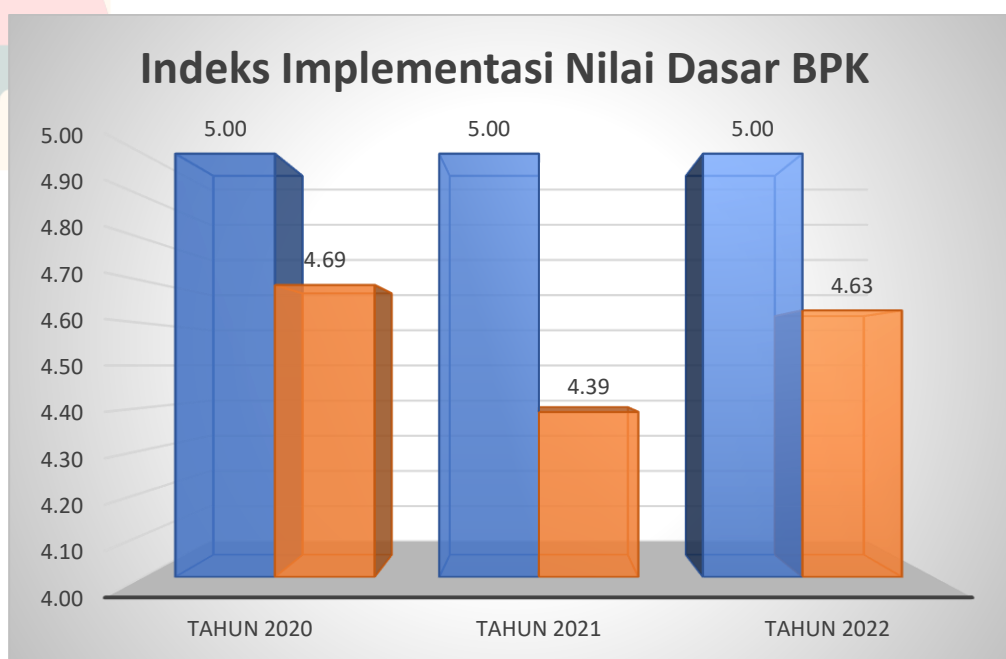
- ❖ 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- ❖ 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- ❖ 3,00 - 3,99 = memuaskan
- ❖ 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 7 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 7		Tahun		
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2020	2021	2022	
Target	5,00	5,00	5,00	
Realisasi	4,69	4,39	4,63	
Capaian Realisasi	93,80	87,80%	92,60%	
Perubahan Realisasi	-	-6,00	+4,80	

Jika disajikan dalam bentuk grafik dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 12. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut realisasi ini mengalami penurunan dari dalam tiga tahun terakhir. Atas realisasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus melakukan evaluasi dan terus mendorong para pegawai untuk meningkatkan implementasi Nilai Dasar BPK di lingkungan kerja, maupun dalam kehidupan.

Berikut perbandingan realisasi IKU 7 Tahun 2022 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 7 Terhadap Target Jangka Menengah dalam Renstra BPK 2020-2024

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,63	92,6%

Pencapaian IKU ini sampai dengan Tahun 2024 belum memenuhi target Renstra. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berupaya untuk terus mendorong pencapaian IKU ini dengan mengoptimalkan pembinaan pegawai tentang pemahaman visi, misi dan implementasi nilai-nilai dasar.

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Sesuai dengan informasi dari Inspektorat Utama dan Direktorat PSMK, hasil evaluasi dari Itama atas Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Kalimantan Utara pada Tahun 2022 adalah sebesar 89,82. Sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan tersebut dikategorikan sebagai kategori A atau Memuaskan.

Pencapaian pada tahun 2022 ini telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88,00. Pencapaian pada 2022 juga lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mendapatkan nilai sebesar 88,59. Atas pencapaian tersebut, skor kinerja yang diberikan adalah 102,97.

Indikator ini menunjukkan pengukuran atau evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. Tujuan dari dilakukannya pengukuran indikator ini adalah untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker. Pengukuran indikator ini sesuai dengan PERMENPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015, di mana nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- ❖ AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- ❖ A = Memuaskan (>80-90)
- ❖ BB = Sangat Baik (>70-80)
- ❖ B = Baik (>60-70)
- ❖ CC = Cukup (>50-60)
- ❖ C = Kurang (>30-50)
- ❖ D = Sangat Kurang (0-30)

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 8 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 dan Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun		
	2020	2021	2022
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)
Realisasi	A (88,59)	A (89,58)	A (89,82)
Capaian Realisasi	103,01%	104,16%	102,07%
Perubahan Realisasi	-	+1,15	-2,09

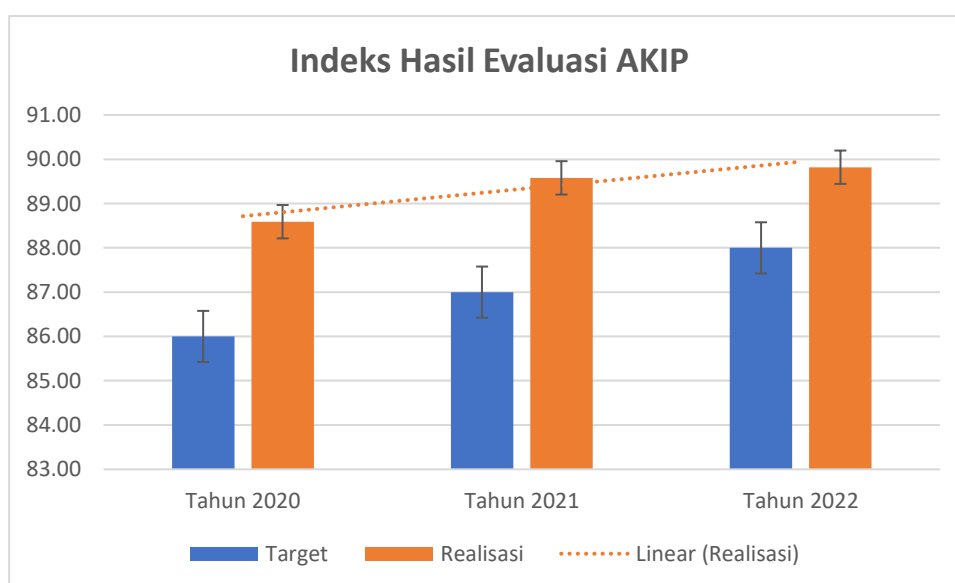
Berdasarkan tabel tersebut, realisasi IKU ini mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dari tahun ke tahun atas rekomendasi yang disampaikan Itama. Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk mempertahankan capaian target setiap tahunnya dengan terus memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan Itama.

Berikut perbandingan realisasi IKU 8 tahun 2021 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 22. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)	A (89,82)	102,07%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 8 sampai dengan Tahun 2024 telah memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk melakukan perbaikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun-tahun selanjutnya, dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan sehingga tersaji informasi yang informatif dan relevan.



Gambar 13. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 8 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, *Big Data Analytic*). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 9 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun		
	2020	2021	2022
Target	95%	95%	97%
Realisasi	99,59%	99,59%	92,52%
Capaian Realisasi	104,83%	104,83%	95,38%
Perubahan Realisasi	+5,24%	+0,00%	-9,45%

Berdasarkan tabel diatas, Realisasi IKU 9 tahun 2022 secara realisasi mengalami penurunan nilai pada tahun 2022. Namun secara capaian realisasi mengalami penurunan sebesar 9,45%. Hal ini dikarenakan target pencapaian IKU ini pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 97%. Meskipun demikian, realisasi tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan perlunya kesadaran tinggi pegawai dalam memanfaatkan layanan teknologi dan informasi dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

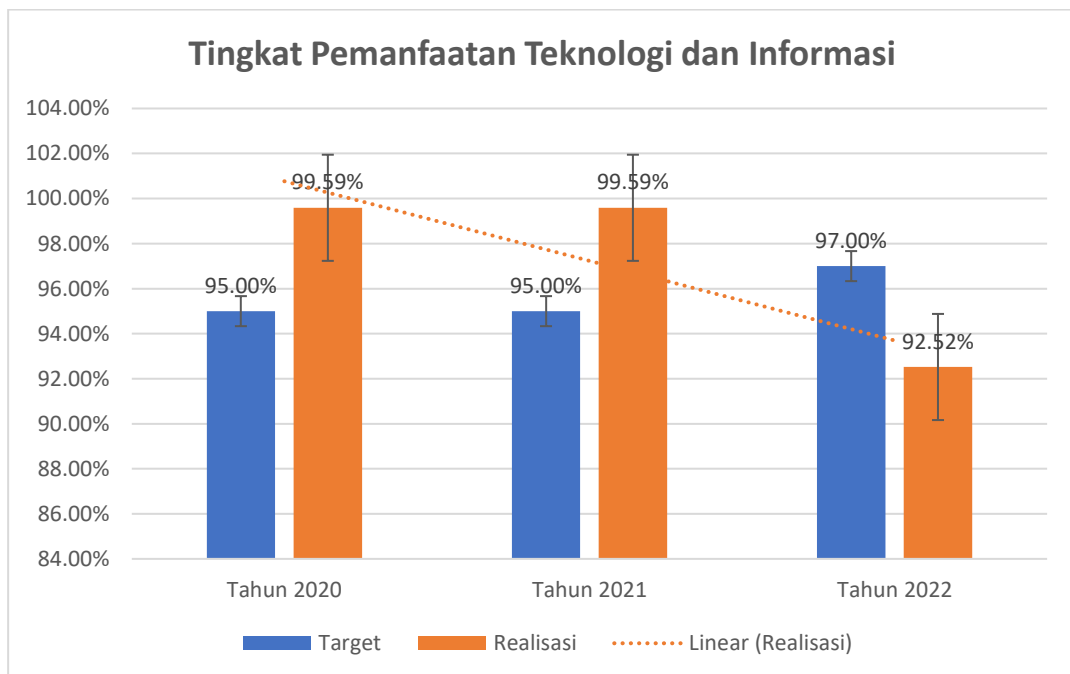
Pada Tahun 2022 tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 92,52% dengan rincian Sub IKU sebagai berikut.

- Realisasi Sub IKU 9.1 tentang Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM sebesar 100,00% (Bobot 20%);

- b. Realisasi Sub IKU 9.2 tentang Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN sebesar 100,00% (Bobot 15%);
- c. Realisasi Sub IKU 9.3 tentang Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi Pemeriksaan SMP sebesar 76,93% (Bobot 20%);
- d. Sub IKU 9.4 Tingkat pemanfaatan aplikasi pemeriksaan SiAP sebesar 86,21% (Bobot 20%); dan
- e. Sub IKU 9.5 Tingkat Pemanfaatan aplikasi SiPTL sebesar 99,58% (Bobot 25%)

Jika ditarik data dari target dan realisasi pencapaian IKU 9 tentang Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan yang signifikan dari capaian realisasi tahun 2020, 2021 dan tahun 2022.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik dapat disajikan sebagai berikut.



Gambar 14. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut realisasi ini mengalami penurunan dalam capaian realisasi pada tiga tahun terakhir. Atas realisasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berupaya terus melakukan evaluasi dan terus mendorong para pegawai untuk meningkatkan pemanfaatan layanan teknologi dan sistem informasi pada setiap jenis pekerjaan pada jabatan dan fungsi.

Berikut perbandingan realisasi IKU 9 Tahun 2022 terhadap target kinerja Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 9 Terhadap Target Jangka Menengah dalam Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	92,52%	95,38%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 9 pada Tahun 2022 belum memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi setiap tahunnya dengan meningkatkan kesadaran pegawai baik dalam hal kualitas layanan TIK sendiri maupun dengan melaksanakan sosialisasi pemanfaatan aplikasi teknologi informasi kepada seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara serta membuka layanan tanya jawab dan bantuan konsultasi tingkat pemanfaatan TI. Dengan demikian, IKU ini dapat dipenuhi secara menyeluruh pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode- metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati

proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 10 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun		
	2020	2021	2022
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian Realisasi	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi	-	-	-

IK 10 yaitu Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan merupakan indikator kinerja yang baru dinilai pada Tahun 2020. Pada Tahun 2022 Terdapat hanya terdapat dua unsur penilaian dari IK ini yaitu mencakup Penerapan *best practice* dan Aktivitas Manajemen Pengetahuan, Usulan *best practice* pada tahun 2022 dijadikan sebagai *optional* (pilihan).

Pada Tahun 2022, realisasi IKU 10 tentang Tingkat Pemanfaatan Manajemen Pengetahuan sebesar 100% atau sama dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas realisasi IKU ini pencapaian yang sama jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2021. Namun demikian, terjadi peningkatan jumlah aktivitas manajemen pengetahuan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2021.

1. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan penyusunan Best Practices dengan judul "BPK Kawan Muda (Maju untuk Daerah) Laporan penyusunan Best Practice tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK. *Best practice* ini belum mendapatkan persetujuan dari Direktorat PSMK sebagai *Innovative Practice* dikarenakan belum mendapat ND balasan dari Direktorat PSMK, sehingga BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memilih *opsi* Penerapan *Best Practice*.
2. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan Penerapan Best Practice (BP) yaitu Penyelenggaraan Komunitas *Litbang Live (Reading*

Corner) dalam Rangka Manajemen Pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Penerapan BP ini merupakan replikasi dari BP Direktorat Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2021. Laporan penerapan Best Practice tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 241/ND/XIX.TJS/09/2022, Tanggal 20 September 2022

3. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022 juga telah melaksanakan Aktivitas Manajemen Pengetahuan (MP). Kegiatan MP yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara selama Tahun 2022 yaitu:

- a. *Knowledge Transfer Forum* (KTF) Diklat Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Laporan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 163/ND/XIX.TJS/07/2022 Tanggal 15 Juli 2022
- b. Blogging Catatan Berita Periode Bulan Januari - Maret. Laporan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 247/ND/XIX.TJS/09/2022 Tanggal 30 September 2022
- c. Blogging Catatan Berita Periode Bulan April - Agustus. Laporan kegiatan tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK sesuai dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 247/ND/XIX.TJS/09/2022 Tanggal 30 September 2022
- d. Wawancara Berbasis Pengetahuan (*Training Need Analysis*).

Berdasarkan pencapaian tersebut, atas IK ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mendapatkan skor kinerja sebesar 100. Pencapaian tersebut telah sesuai dengan target di Tahun 2021 dan sama dengan pencapaian pada Tahun 2020.

Berikut perbandingan realisasi IKU 10 Tahun 2022 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 10 Terhadap Target Jangka Menengah dalam Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 10 pada Tahun 2022 telah memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk mempertahankan capaian IKU ini dengan melakukan aktivitas manajemen pengetahuan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK. Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

IKU ini berdasarkan hasil survei pengukuran indikator yang dilaksanakan oleh lembaga independen yang dilaksanakan secara tahunan, dengan sasaran responden eksternal.

Pengukuran dilakukan menggunakan skala berikut.

- ❖ 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- ❖ 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- ❖ 3,00 - 3,99 = memuaskan
- ❖ 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 11 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun		
	2020	2021	2022
Target	3,80	3,80	3,80
Realisasi	4,08	4,06	4,10
Capaian Realisasi	107,36%	106,84%	107,89%
Perubahan Realisasi	-	-0,52	+1.05

Pada Tahun 2022, realisasi IKU ini sebesar 4,10 (sangat memuaskan) atau mengalami peningkatan sebesar 0,04 jika dibandingkan realisasi Tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas komunikasi yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara kepada pemangku kepentingan. Berikut perbandingan realisasi IKU 11 Tahun 2022 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 11 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja				Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
				2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 11	Tingkat Pemangku Kualitas	Kepuasan Kepentingan Komunikasi	Para atas	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,10	107,89%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 11 pada Tahun 2022 telah memenuhi target Renstra sampai dengan tahun 2024. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

IKU ini mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai sesuai standar pengembangan kompetensi di BPK. IKU ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tulus dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut.

1. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara).
2. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014).
3. Standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 12 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 dengan Capaian Tiga Tahun

IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun		
	2019	2020	2021
Target	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%
Capaian Realisasi	100%	100%	100%
Perubahan Realisasi	-	-	-

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 12 dalam tiga tahun terakhir memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 terdapat 71 pegawai dari 71 pegawai yang telah memenuhi standar jam pelatihan. Upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022 untuk dapat memenuhi pencapaian IKU ini, yaitu dengan melaksanakan diklat mandiri di Kantor Perwakilan dan mengikutkan pegawai pemeriksa maupun non pemeriksa mengikuti diklat di Badan Diklat secara *distance learning*.

Berikut perbandingan realisasi IKU 12 Tahun 2022 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 12 Terhadap Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU 12 sampai dengan Tahun 2022 telah memenuhi target Renstra sampai dengan Tahun 2024. Dalam upaya mempertahankan pencapaian IKU 12 untuk setiap tahunnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berperan aktif dalam mengikutkan pegawai pemeriksa mengikuti diklat mandiri maupun diklat di Badan Diklat.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Indikator ini menunjukkan tingkat optimalisasi pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut. Indikator ini mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). IK 13 yaitu Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran. IK ini menunjukkan bagaimana upaya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pencapaian indikator ini menggunakan dua penilaian yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Pemberian nilai untuk masing-masing indikator akan dihitung oleh Biro Keuangan

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran;
2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi;
3. Pencapaian keluaran;
4. Efisiensi

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 th 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Cakupan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) meliputi EKA Reguler dan EKA Nonreguler sebagai salah satu instrument penerapan berbasis kinerja

Berikut perbandingan realisasi capaian IKU 13 Tahun 2022 dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dan Tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun		
	2020	2021	2022
Target	87%	87,5%	88%
Realisasi	92,60%	90,94%	90,20%
Capaian Realisasi	106,43%	103,93%	102,50%
Perubahan Realisasi	+6,43	-2,5	-1,43

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian IKU 13 pada Tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2021. Penurunan ini dikarenakan pada Tahun 2021 terjadi kebijakan *Automatic Adjustment* yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan sehingga berimbas kepada rencana kegiatan satuan kerja serta salah satu komponen pada EPA yaitu Rencana Penarikan Anggaran (RPD) diukur tidak optimal. Namun demikian, Realisasi IKU 13 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dapat dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, untuk tahun 2019 tidak bisa dibandingkan, karena berbeda dalam formulasi perhitungan.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 sebesar 85,96% atau dalam kategori **Baik**. Adapun rincian nilai tersebut sebagai berikut.

1. Penyerapan anggaran sebesar 99,43%;

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Bobot pengukuran sebesar 9,7%.

2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 99,48%

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Bobot pengukuran sebesar 18,2%.

3. Capaian *Output* (Pencapaian keluaran) sebesar 100%;

Pencapaian keluaran merupakan perbandingan antara pencapaian keluaran dengan target keluaran baik pada volume keluaran kegiatan dan indikator kinerja keluaran. Bobot pengukuran sebesar 4,50%.

4. Efisiensi sebesar 51,42%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dan selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Bobot pengukuran sebesar 28,6%.

Atas nilai EKA tersebut dan untuk perbaikan kedepannya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- a. Memastikan pencapaian Rincian Output (RO) Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan sesuai komitmen;
- b. Memperhatikan capaian target Rincian Output yang masih dinilai rendah sebagai perbaikan tahun selanjutnya;
- c. Melakukan penajaman kegiatan secara berkala serta melakukan optimalisasi dan efisiensi atas pagu anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA/POK;
- d. Memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, waktu, sarana prasarana dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian dan menyusun rencana aksi penanganan;
- f. Melibatkan segenap pemangku kepentingan agar dapat memberikan masukan dalam peningkatan kinerja satker.

Pencapaian salah satu komponen pada IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran yaitu nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 96,57%. Rincian nilai sub komponen tersebut sebagai berikut.

- a. Revisi DIPA sebesar 100. Nilai ini menunjukkan pengajuan revisi DIPA dalam batas kewajaran.
- b. Deviasi halaman III DIPA sebesar 80,56. Deviasi dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan realisasi anggaran terhadap RPD. Deviasi halaman III DIPA BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 telah baik dengan rasio penyimpangan 19,44%.
- c. Pagu minus sebesar 100. Nilai ini menunjukkan tidak ada pagu minus pada pelaksanaan anggaran.
- d. Belanja Kontraktual sebesar 91. Nilai ini menunjukkan penyampaian data kontrak tepat waktu.
- e. Pengelolaan UP dan TUP sebesar 99,9. Nilai ini menunjukkan pengelolaan UP dan TUP yang optimal.
- f. LPJ Bendahara sebesar 100. Nilai ini menunjukkan penyampaian LPJ Bendahara yang tepat waktu.
- g. Dispensasi SPM sebesar 100. Nilai ini menunjukkan penyampaian SPM dalam batas waktu yang ditentukan.
- h. Penyerapan anggaran sebesar 97,14. Nilai ini menunjukkan penyerapan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan target ideal.
- i. Penyelesaian tagihan sebesar 100. Nilai ini menunjukkan penyelesaian tagihan dalam batas waktu yang ditentukan.
- j. Capaian output sebesar 100. Nilai ini menunjukkan output keseluruhan tercapai.
- k. Perencanaan Kas sebesar 0. Nilai ini menunjukkan perencanaan kas yang akurat.
- l. Kesalahan SPM sebesar 100. Nilai ini menunjukkan pengajuan SPM yang benar.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkontribusi dalam upaya perbaikan atas nilai EPA ini dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, mereviu kembali rencana kegiatan dan melakukan indentifikasi risiko-risiko yang menghambat pencapaian kinerja serta menyusun rencana aksi penanganan risiko dalam pelaksanaan anggaran.
- b. Aspek kepatuhan atas regulasi, meningkatkan ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak, pertanggungjawaban UP/TUP, penyampaian LPJ bendahara, serta penyelesaian tagihan tepat waktu.

- c. Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan, meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM untuk menghindari retur SP2D, merealisasikan anggaran secara proporsional sesuai target penyerapan triwulanan dan memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan khususnya untuk SPM LS Non Pegawai.
- d. Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan akurasi rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran, ketepatan waktu dalam penyampaian perencanaan kas dan meningkatkan ketelitian dalam penerbitan SPM untuk menghindari kesalahan/pengembalian oleh KPPN.
- e. Memantau capaian IKPA secara berkala melalui OM SPAN, agar dapat segera melaksanakan langkah-langkah strategis peningkatan aspek kinerja.
- f. Berkoordinasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN mitra kerja setempat, sebagai upaya bersama dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran.

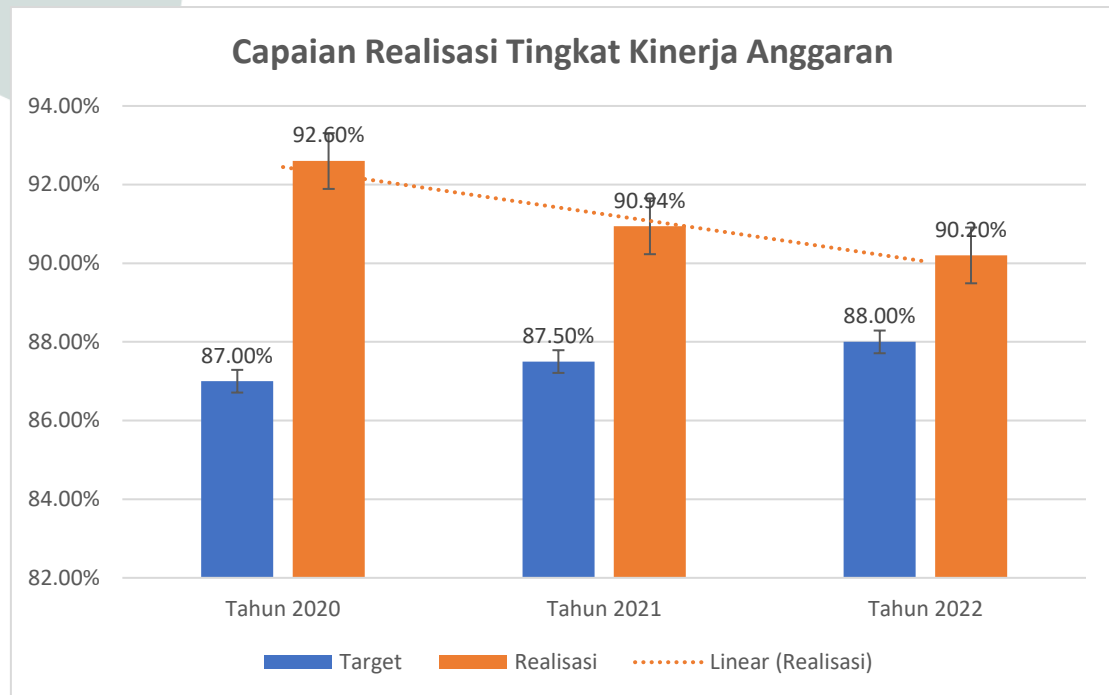
Berikut perbandingan realisasi IKU 13 Tahun 2022 terhadap target kinerja tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 32. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 Terhadap Target Jangka Menengah dalam Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja		Target					Realisasi 2022	Realisasi Tahun 2022 Dibanding Target Kinerja 2024
		2020	2021	2022	2023	2024		
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%	90,20%	102,50%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian IKU sampai dengan Tahun 2024 telah memenuhi target Renstra. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu dengan mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Perbandingan capaian realisasi dan target pada tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran.



Gambar 15. Perbandingan Realisasi Capaian IKU 13 dengan Capaian Tiga Tahun Terakhir

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut realisasi pada IKU 13 tentang Tingkat Kinerja Anggaran mengalami penurunan dalam capaian realisasi pada tiga tahun terakhir, tetapi tetap konsisten dalam melampaui target rencana strategis. Atas realisasi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berupaya terus melakukan evaluasi terhadap manajemen kinerja anggaran serta melakukan upaya perbaikan atas setiap sub komponen pada Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menteri Keuangan menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran (*output*) Program dan efisiensi Keluaran (*output*) Kegiatan meliputi:

1. Data capaian Keluaran (*output*) Program;
2. Data capaian Keluaran (*output*) Kegiatan;
3. Pagu Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran.

Pengukuran efisiensi dihitung berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pada Tahun 2022, nilai efisiensi atas kinerja anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebesar 51,42%. Nilai ini menunjukkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara masuk dalam kategori telah melakukan efisiensi terhadap pemakaian anggaran dalam rangka pencapaian keluaran.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi 6 - Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan serta memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi pada hal ini yaitu dengan menggunakan media virtual *zoom meeting* pada saat pelaksanaan *Entry Meeting* Pemeriksaan LKPD pada tahun 2022 yang dilaksanakan oleh setiap entitas pemeriksaan (*auditee*).

2. Pengelolaan BMN,

Pengelolaan BMN yang Optimal yaitu salah satu nya adalah penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi untuk mengurangi biaya pemeliharaan, biaya perbaikan, serta biaya *maintenance*.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penggunaan Anggaran yang optimal akan mendukung kinerja suatu organisasi dengan baik. Efisiensi penggunaan anggaran yang tepat sasaran akan berdampak baik pada pengelolaan anggaran di masa yang akan datang. Efisiensi pada pengelolaan anggaran di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara yaitu dengan memaksimalkan suatu rencana kegiatan dengan *output* lebih maksimal dengan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.

E. Perubahan Budaya Kerja

Budaya Kerja yang tertanam pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga sebagai moto untuk meningkatkan semangat kerja yaitu GENTAMU. Budaya Kerja GENTAMU selain diharapkan mampu menjaga integritas pegawai BPK Kaltara juga sebagai landasan kuat pada program kegiatan yang sejalan dengan nilai-nilai dasar ASN. Budaya Kerja BPK Kaltara yaitu GENTAMU yaitu akronim dari Giat, Empati, Netral, Tegas, Assertif, Mandiri, dan Unggul. Budaya Kerja GENTAMU merupakan turunan dari perspektif nilai-nilai dasar ASN yaitu Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif). Perubahan budaya kerja GENTAMU menjadi dasar bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk dapat meningkatkan semangat kerja, meningkatkan inovasi, serta melakukan perbaikan atas setiap capaian kinerja.

F. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 616 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 16.026.553.000,-. Anggaran ini terbagi ke dalam anggaran Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) sejumlah Rp 5.397.063.000,- dan anggaran Rencana Kegiatan Sekretariat dan Penunjang (RKSP) sejumlah Rp 10.629.490.000,-. Realisasi Anggaran pada RKP menunjukkan bahwa realisasi anggaran 99,33% dari pagu dan realisasi RKSP menunjukkan bahwa realisasi anggaran dengan persentase 99,51%. Berikut tabel anggaran dan realisasi RKP dan RKSP pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

Tabel 33. Anggaran dan Realisasi RKP Tahun 2022

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	%
1	1043.FAF.U41	LHP BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	2,381,704,000	12 LHP	2,357,862,468	98,99%
a.		LHP Keuangan	763,120,850	5 LHP	761,653,660	99,81%
b.		LHP Kinerja	1,130,630,150	5 LHP	1,111,369,808	98,30%
c.		LHP DTT	487,953,000	2 LHP	484,839,000	99,36%
2	1043.FAF.051	LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	82,898,000	60 LHP	82,314,310	99,30%
3	1043.FAF.U89	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	1,638,386,000	13 LHP	2.952.755.318	99,95%

No.	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	%
a.		LHP Keuangan	588,111,500	6 LHP	587,805,500	99,25%
b.		LHP Kinerja	714,896,600	5 LHP	726,586,266	101,64%
c.		LHP DTT	335,377,900	2 LHP	315,783,145	94,16%
4	1043.FAF.059	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	655,327,000	1 LHP	496.709.008	98,19%
5	1043.FAF.116	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	75,656,000	12 Laporan	75,640,888	99,98%
6	1043.FAF.124	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	76,233,000	12 Laporan	76,030,588	99,73%
7	1043.FAF.083	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1,960,000	1 Rumusan	1,954,500	99,72%
8	1043.FAF.174	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	444,324,000	12 Laporan	442,823,044	99,98%
a.		Pelaksanaan Layanan Dukungan Administrasi Pemeriksaan	10,278,000		10,218,500	99,42%
b.		Pelaksanaan Konsultasi/Koordinasi/Bimbingan Teknis Pemeriksaan	356,441,000		355,976,420	99,87%
c.		Pelaksanaan Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	47,587,000		47,194,619	99,18%
d.		Pelaksanaan Reviu atas Hasil Pemeriksaan	7,760,000		7,707,000	99,32%
e.		Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen SIKAD	22,258,000		21,726,505	97,61%
9	1043.FAF.091	Sumbangan IHPS Perwakilan	37,244,000	2 SIHPS	37,092,980	99,59%
10	1043.FAF.099	Laporan Profil Entitas Perwakilan	3,331,000	6 Laporan	3,330,000	99,97%
Jumlah (1 s.d. 10)			5.397.063.000	130	5,361,027,889	99,33%

Tabel 34. Anggaran dan Realisasi RKSP Tahun 2022

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	%
1	1043.FAF.175	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1,641,263,000	20 Laporan	1,633,195,143	99,51%
a		Melaksanakan Layanan Tata Usaha	39,390,000		39,290,900	99,75%
b		Melaksanakan Layanan Kehumasan	326,164,000		325,504,590	99,80%
c		Melaksanakan Layanan Sumber Daya Manusia	252,132,000		251,419,090	99,72%
d		Melaksanakan Layanan Keuangan	264,840,000		264,740,716	99,96%

No	Kode RO	Rincian Output (RO)	Anggaran (Rp)	Target Volume RO	Realisasi (Rp)	%
e		Melaksanakan Layanan Umum dan TI	457,211,000		453,957,871	99,29%
f		Melaksanakan Layanan Hukum	220,828,000		217,889,166	98,67%
g		Melaksanakan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK	24,150,000		24,150,000	100,00%
h		Melaksanakan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	56,548,000		56,242,810	99,46%
2	1043.CAN.001	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	239,520,000.00	18 Layanan	239,165,600	99,85%
a		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	239,520,000.00		239,165,600	99,85%
3	1043.EBA.994	Layanan Perkantoran	8,748,707,000	1 Layanan	8,705,022,747	99,50%
a		Gaji dan Tunjangan	3,839,935,000		3,833,241,157	99,83%
b		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,908,772,000		4,871,781,590	99,25%
a)		Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan	971,584,000		971,584,000	100,00%
b)		Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan	38,400,000		31,114,474	99,28%
c)		Layanan Perkantoran Bidang Sumber Daya Manusia	327,626,000		324,562,625	99,06%
d)		Layanan Perkantoran Bidang Keuangan	221,520,000		221,520,000	100,00%
e)		Layanan Perkantoran Bidang Umum dan TI	3,217,229,000		3,192,390,491	99,23%
f)		Layanan Dukungan Kesekretariatan Perwakilan	132,413,000		130,610,000	98,64%
		Jumlah (1 s.d. 3)	10,629,490,000	39	10,577,383,490	99,51%

G. Inovasi

Inovasi ialah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang dilakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya. Inovasi ialah sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Inovasi merupakan capaian penting pada suatu organisasi atau instansi pemerintah. Capaian Inovasi ada Tahun 2022 merupakan salah satu komponen pada realisasi IKU 10 tentang Tingkat Pemanfaatan Manajemen Pengetahuan. Inovasi yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Buku Tamu berbasis digital *database*.
2. Digitalisasi pada Form Peminjaman Kendaraan Dinas dan Peminjaman Ruang, dengan tujuan untuk meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*).
3. *Online Pick Up Point*, yang merupakan media atau tempat yang dikhususkan untuk penjemputan oleh ojek *online* ataupun dalam mengantar barang atau makanan.
4. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan penyusunan Best Practices dengan judul "BPK Kawan Muda (Maju untuk Daerah) Laporan penyusunan Best Practice tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK.
5. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan Penerapan Best Practice (BP) yaitu Penyelenggaraan Komunitas *Litbang Live (Reading Corner)* dalam Rangka Manajemen Pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Penerapan BP ini merupakan replikasi dari BP Direktorat Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2021. Laporan penerapan Best Practice tersebut telah disampaikan kepada Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Kepala Perwakilan Nomor 241/ND/XIX.TJS/09/2022, Tanggal 20 September 2022.

H. Penghargaan

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah mendapatkan beberapa penghargaan yang telah di peroleh. Raihan Penghargaan pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara tidak lepas dukungan setiap pegawai serta pihak manajemen yang terus menerus memberikan *support* kepada satuan kerja. Penghargaan yang dicapai oleh satuan kerja merupakan buah hasil kerja keras dari setiap elemen yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Penghargaan yang telah dicapai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara diantaranya sebagai berikut:

1. Satuan Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2021 – 2022
2. Juara dua se-Nasional pada Instansi BPK RI terkait Lomba Video Budaya Sadar Risiko pada kategori Bidang Seni dan Kreativitas Rangkaian HUT BPK RI Ke-76

BAB IV

PENUTUP

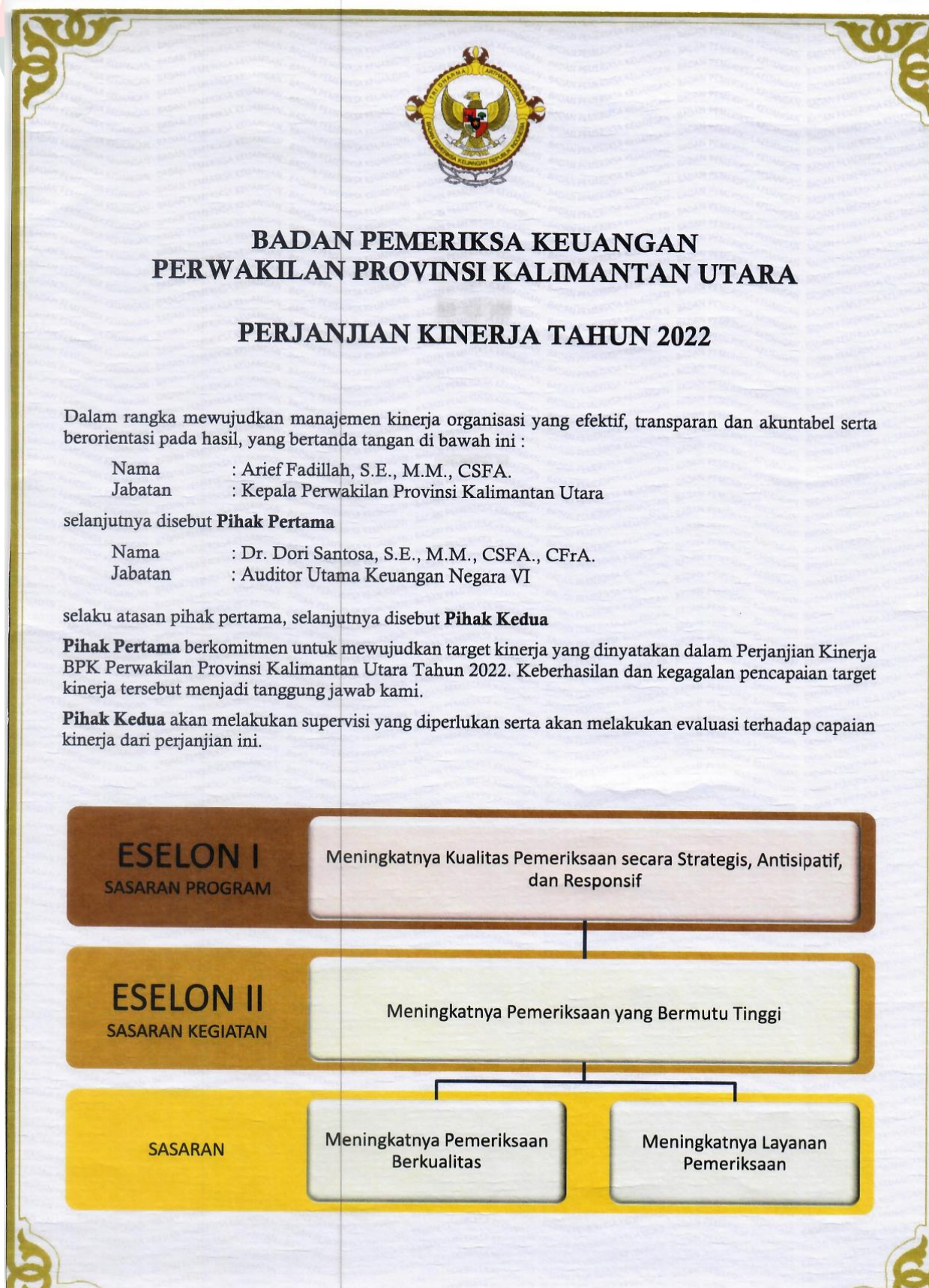
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggung jawaban BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara kepada publik untuk memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja dan upaya penanganannya. LAK juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Pencapaian BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2022, dalam pencapaian skor kinerja adalah sebesar 100,29. Pencapaian tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pencapaian tahun 2021 yang sebesar 100,08. Dari 13 Indikator Kinerja (IK), sebanyak tujuh IK melampaui target yang ditentukan, tiga IK telah sesuai dengan target dan hanya tiga IK yang belum mencapai target. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk mempertahankan pencapaian dari tahun ke tahun dengan menerapkan rencana aksi yang telah disusun. Untuk Indikator Kinerja yang belum mencapai target BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara melakukan upaya-upaya perbaikan dengan memanfaatkan evaluasi tahun ini untuk perbaikan tahun kedepannya.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya untuk mempertahankan pencapaian kinerja yang sudah sesuai dan yang telah melampaui target yang ditetapkan. Agar dapat meningkatkan pencapaian target kinerja yang belum tercapai, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2022 akan memperbaiki tingkat konsistensi dan akurasi LHP yang diterbitkan serta akan meningkatkan pemahaman kepada para pegawai BPK baik Pemeriksa maupun Non-Pemeriksa mengenai Visi Misi dan Nilai Dasar BPK melalui sosialisasi dan menerapkannya dalam tingkah laku keseharian dan pekerjaan yang dilakukan.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Perjanjian Kinerja dan Piagam Manajemen Risiko BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

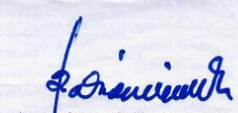
Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Jakarta, Desember 2021

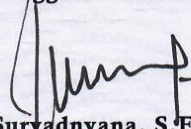
Pihak Kedua,


Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA.,
CFrA.

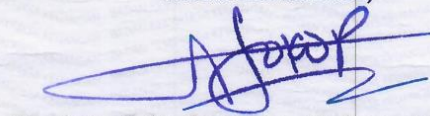
Pihak Pertama,


Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA.

Diketahui oleh:
Anggota VI BPK,


Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.

Wakil Ketua BPK,


Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.,
CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.

Ketua BPK,


Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.,
CFrA., CGCAE., QGIA.



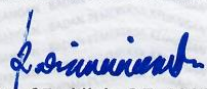
PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
SATUAN KERJA PEMILIK RISIKO
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pada Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Saya menyatakan bahwa:

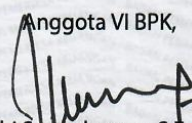
1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan komitmen penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan konteks, profil dan peta risiko, serta penanganan risiko pada level Satuan Kerja Pemilik Risiko BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pelaksanaan proses tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan manajemen risiko yang berlaku di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
3. Rencana aksi penanganan risiko dilaksanakan oleh seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, Saya berkomitmen melaksanakan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh Pelaksana pada Satuan Kerja Pemilik Risiko yang Saya pimpin.

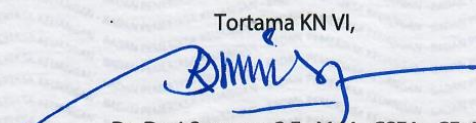
Jakarta, Januari 2022

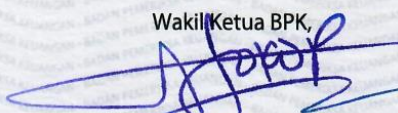
Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara,


Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA.

Diketahui oleh:

Anggota VI BPK,

Nyoman Adhi Sunyadnyana, S.E., M.E., CSFA.

Tortama KN VI,

Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFrA.

Wakil Ketua BPK,

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.,
CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.

Ketua BPK,

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA.,
CGCAE., QGIA.

Lampiran 2. Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

IK	Uraian	Target	Realisasi	Skor	Persentase Realisasi Dibanding Target (%)
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,68	91,68	91,68
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100	100,00
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,84%	105	114,45
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,03%	101,03	101,03
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	101%	101	101
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,46%	100,46	100,46
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,63	92,60	92,60
8	Hasil Evaluasi AKIP	88,00	89,82	102,07	102,07
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	92,52%	95,38	95,38
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100	100,00
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,10	105	105
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100	100
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90,20%	102,50	102,50
Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara 2022				100,29	

Lampiran 3

Alokasi Anggaran Pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

ALOKASI ANGGARAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022			
Uraian	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	
Strategi 1 - Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	5.104.531.000,00	5.397.063.000,00	
Strategi 2 - Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	10.698.106.000,00	10.809.490.000,00	
Jumlah Anggaran	15.802.637.000,00	16.206.553.000,00	

Lampiran 4

Perbandingan Realisasi Capaian Tahun Pelaporan Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Dan 2022

IK	Uraian	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,68%	88,57%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	85,84%	86,08%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	101,03%	100,28%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	101%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,46%	100,18%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,63	4,39
8	Hasil Evaluasi AKIP	88,00	89,82	89,58
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	92,52%	99,59%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,10	4,06
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%
13	Tingkat Kinerja Anggaran	88%	90,20%	90,94%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 (Setelah Revisi) : Rp16.315.591.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp15.819.930.194,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022 (Setelah Revisi) : Rp16.206.553.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp15.938.411.379,00

**PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2022 DENGAN TARGET LIMA TAHUN SESUAI DENGAN RENSTRA 2020-2024
PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE REALISASI TAHUN 2022 DIBANDING TARGET TAHUN 2022
1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	91,68	91,68
2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	85,84%	114,45
4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	101,03%	101,03
5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101,00
6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100,46%	100,46
7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,63	92,60
8 Hasil Evaluasi AKIP	86,00	87,00	88,00	89,00	90,05	89,82	102,07

	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2022	PERSENTASE REALISASI TAHUN 2022 DIBANDING TARGET TAHUN 2022
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	92,52%	95,38
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,10	105,00
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00
13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89,7	90,20%	102,50

ANGGARAN DAN REALISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022
YANG DIGUNAKAN UNTUK MEWUJUDKAN KINERJA ORGANISASI

No	Nama Indikator Kinerja	Anggaran Sebelum Revisi (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi terhadap Anggaran Setelah Revisi (%)
1	Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas	5.104.531.000,00	5.397.063.000,00	5,361,027,889,00	99,33%
2	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	10.698.106.000,00	10.809.490.000,00	10,577,383,490,00	99,51%
Jumlah		15,802,637,000.00	16,206,553,000.00	15,938,411,379.00	99,45%



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Jalan Mulawarman No.98 Tarakan 77111
Telepon (0551) 33939

